

PERAN AGAMA TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI JAWA TENGAH

The Role of Religion in Voters' Preference During General Election 2014 in Central Java

ARIF SOFIANTO

Balitbang Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol 190 Semarang,
Jawa Tengah.
Telp. 024 3540025
Email: areef_sofiant@yahoo.com

Naskah diterima : 29 Juli 2015
Naskah direvisi : 9 – 11 November 2015
Naskah disetujui : 4 Desember 2015

Abstract

Muslims are the largest part of Indonesian society, but in the history of elections, Islamic political parties have never won. The nationalist party tended to be a strong party, whereas religion-based party tend to be a weak party. This study aims to analyze how the influence of religion values on voting behavior during legislative elections in the Central Java. This study was conducted in 10 electoral districts in Central Java and it involved 400 respondents. This research used a qualitative and a quantitative method. The result depicted that religious values were used by voters as reference in assessing political figures whether they are good or bad, without looking at the background of parties and ideologies. Voters are more influenced by rational and pragmatic considerations than the leaders or religious organization.

Keywords: general election, religion, voting behavior, Central Java

Abstrak

Umat Islam adalah bagian terbesar masyarakat Indonesia, namun dalam sejarah pemilu partai politik yang berhaluan Islam belum pernah menang. Partai nasionalis cenderung kuat dan partai berbasis agama cenderung lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengaruh nilai-nilai agama terhadap perilaku memilih dalam pemilu legislatif di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di 10 daerah pemilihan di Jawa Tengah dan melibatkan 400 responden. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama menjadi landasan dan rujukan dalam menilai figure politik yang baik dan buruk, tanpa melihat latar belakang partai dan ideologinya. Pemilih dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitas diri sendiri dibanding tokoh atau organisasi agama.

Kata kunci: Pemilihan umum, agama, perilaku pemilih, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Berbagai isu dalam tatanan kehidupan negara dan masyarakat Indonesia kini dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi menurut Schumpeter (Agustino, 2007:139-140) merupakan kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Mayo (Budiardjo, 2008:17) berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan, sementara Huntington

mengidentikkan demokrasi dengan pemilu (Agustino, 2007:141-142). Pemilu menurut Huntington sebagaimana dikutip Pamungkas (2009:4) merupakan alat serta tujuan demokrasi. Kebanyakan orang kemudian mengidentikkan demokrasi dengan pemilu meskipun menurut sebagian kalangan, musyawarah mufakat masih dianggap sebagai bentuk budaya demokrasi asli masyarakat Indonesia yang tumbuh sejak lama (Zuhro dkk, 2009:2).

Sejalan dengan teori budaya politik Almond dan Verba (Chilcolte, 2007: 302), ada 3 tipe budaya politik. *Pertama*, adalah budaya politik parokial, yaitu rendahnya pengharapan dan kepedulian individu-individu terhadap pemerintah. *Kedua*, budaya politik subjek di mana individu-individu peduli dengan keluaran yang dicapai pemerintah namun tidak berpartisipasi dalam proses. *Ketiga*, adalah budaya politik partisipan di mana individu-individu bersikap aktif dan terlibat dengan sistem secara utuh yang menunjukkan tingkatan tertinggi yang dicapai dalam masyarakat modern.

Masyarakat Indonesia masih berada pada tahap lebih mengutamakan formalitas atau prosedur semata. Seperti halnya disampaikan Haynes (2000:147), demokrasi di kebanyakan negara dunia ketiga lebih memperlihatkan sisi formalitas, yang terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan, dan lebih khusus lagi terfokus pada pemilihan umum. Survei Lembaga Survei Indonesia (2011) menunjukkan bahwa sebagian besar orang Indonesia (77,3%) percaya demokrasi adalah sistem terbaik untuk Indonesia, dan mampu menyelesaikan masalah (67,9%). Lebih lanjut Marcus Mietzner (2009) mencatat bahwa demokratisasi di Indonesia lebih menampilkan wajah popularitas figur di hadapan rakyat. Pemaknaan demokrasi jauh dari persoalan kinerja politik, namun mengarah pada performa individu.

Demokrasi dan pemilu sering dikaitkan dengan partisipasi politik, yang menurut Budiardjo (2008:367) adalah kegiatan orang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Ramlan Surbakti (Gatara, 2009:317) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga biasa dalam penentuan keputusan menyangkut kepentingannya namun kegiatan tersebut tidak selalu mencerminkan sikap dan orientasi pelaku. Ada beberapa alasan seseorang berpartisipasi atau tidak dalam politik. Menurut Frank Lindenfeld (Maran, 2007:156), faktor utama pendorong partisipasi politik adalah kepuasan finansial. Milbrath (Maran, 2007:156) menyebutkan ada 4 faktor yang mendorong partisipasi politik, yaitu adanya perangsang, karakteristik pribadi

seseorang, karakter sosial seseorang, dan faktor situasi atau lingkungan. Mas'ood dan MacAndrews (2006:37-40) menyatakan bahwa keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik langsung merupakan faktor yang berpengaruh.

Sebuah fenomena menarik di Indonesia terkait dengan pemilu dan demokrasi adalah bahwa meskipun umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, namun dalam sejarah pemilu belum satupun partai politik berhaluan Islam yang memenangi pemilu. Demikian juga dalam memaknai sistem pemerintahan yang baik, meskipun mayoritas Islam, namun sistem politik yang dianggap paling baik adalah demokrasi ala barat yang sekuler.

Survei yang dilakukan oleh Sharma, et al (2010) yang difasilitasi *IFES (International Foundation for Electoral Systems)* mengenai pemilu terhadap masyarakat Indonesia tahun 2010 menghasilkan beberapa temuan penting. Terkait dengan pengaruh nilai-nilai dan norma terhadap demokrasi, 62% orang Indonesia mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh penting terhadap politik, yang mempengaruhi keputusan sampai batas tertentu (44%) atau terhadap sebagian besar keputusan mereka (18%), dan sisanya 38% mengatakan agama tidak berpengaruh. Pengaruh agama terhadap pengambilan keputusan politik telah menurun dibanding tahun 2008, yaitu sebesar 79% (49% sampai batas tertentu dan sebagian besar 30%).

Studi lainnya dilakukan oleh Mujani dan Liddle (2010) dengan judul "*Indonesia; personalities, parties, and voters*" yang menghasilkan beberapa temuan berbeda. Penelitian tersebut menemukan bahwa telah tumbuh rasionalitas pemilih, dimana pemilih semakin "rasional." Pemilih telah menetapkan standar tujuan atau prioritas keberhasilan pemimpin berupa: pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, persatuan nasional, pendidikan, dan penegakan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat lebih percaya pada individu-individu ketimbang partai politik, dengan standar individu berupa integritas pribadi, kepedulian sosial, dan kompetensi

profesional. Agama dan etnis saat ini tidak menjadi faktor utama, identitas agama atau etnis tidak memberikan pengaruh utama dalam orientasi pemilih.

Penelitian lain tentang pemilu di Indonesia dilakukan oleh Marcus Mietzner (2009), berjudul *“Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia catalyst or obstacle to democratic consolidation?”* Temuan utama dari penelitian tersebut adalah terjadinya lompatan besar dalam politik Indonesia sebagai wujud konsolidasi demokrasi, yaitu kecenderungan baru partai untuk mencalonkan orang yang populer. Popularitas individual adalah senjata paling ampuh yang ditemukan partai politik selama puluhan tahun berjibaku dalam pemilu. Dalam konteks ini, ada sebuah pertanyaan, apakah seseorang populer karena *track record* yang bersih, kemampuan, afiliasi etnis dan agama, atau hanya strategi pemasaran politik yang sukses. Di sisi lain, partai-partai berhaluan Islam masih tetap optimis meraih dukungan, meskipun di satu sisi ada rasionalitas yang menguat, serta kecenderungan kuatnya pengaruh figur dibanding partai politik dan ideologinya. Banyaknya partai Islam juga menandakan terpecahnya kekuatan Islam.

Reformasi politik tahun 1998 merupakan pintu bagi meningkatkannya pembentukan partai politik berbasis agama (terutama Islam) setelah sebelumnya dikekang Orde Baru dengan paham tunggal Pancasila (Romli, 2004:36). Kenyataannya, hasil pemilu pascareformasi menunjukkan kekalahan partai-partai Islam meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang diakibatkan oleh banyaknya partai, aliran politik yang lebih nasionalis-religius dan pluralis, serta perubahan ideologi masyarakat yang lebih mementingkan substansi Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam (Romli, 2004:47).

Di Jawa Tengah, pada tahun 2009 perolehan partai-partai beraliran agama jauh di bawah partai nasionalis. PDIP memperoleh 22,98 persen, Partai Demokrat 15,74 persen, dan Golkar sebanyak 11,54 persen, sementara partai berbasis agama yaitu

PKB memperoleh 7,85 persen, PKS sebesar 7,19 persen, PAN sebanyak 6,71 persen, PPP sebanyak 6,21 persen, PKNU sebanyak 1,83 persen, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) sebagai partai berhaluan agama non-Islam hanya memperoleh 0,57 persen saja. Pada Pemilu 2009, partai Islam yang unggul adalah yang lebih condong berhaluan nasionalis-religius dan hanya unggul di 3 daerah, yaitu Kabupaten Pekalongan (PKB), Kabupaten Demak (PKB) dan Kabupaten Banjarnegara (PAN). Sesuai hasil penelitian Basyar (Jurnal Penelitian Politika, 2004:60) keunggulan partai Islam tahun 2004 di Pekalongan belum serta merta berarti kemenangan simbol “hijau” atau Islam. Masyarakat dan wakilnya lebih melihat kepentingan yang pragmatis, kurang peduli pada simbol “hijau”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk mengkaji bagaimana agama memberikan arahan dan tuntunan dalam menentukan pilihan. Apakah agama masih memiliki peran tertentu bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian mengenai perilaku pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. Fokus tulisan ini adalah mengkaji peran agama dalam mempengaruhi perilaku pemilih di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh warga Jawa Tengah yang telah memiliki hak pilih, dalam hal ini berusia minimal 17 tahun atau telah menikah yang tersebar di 10 daerah pemilihan (Dapil) terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data dari populasi, yaitu berupa informan dan sampel responden. Informan adalah mereka yang memberikan informasi lebih banyak melalui wawancara, yang berasal dari unsur: 1). Aparat pemerintah yang bertanggungjawab terhadap urusan politik, 2). Para pelaku pemilu yang terdiri dari para anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota wilayah penelitian. 3). Para tokoh masyarakat di sekitar lokasi pengambilan sampel, dalam hal ini terdiri

dari kepada desa/lurah, LKMD/LPMK serta tokoh masyarakat dari unsur lainnya.

Responden berasal dari para pemilih yang tersebar di seluruh Dapil sebesar 400 orang. Besar sampel ditentukan dengan rumus Slovin, sebagai berikut: $n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$, dengan ketentuan: n = jumlah sampel, N = populasi, d = taraf signifikansi. Jumlah pemilih di Jawa Tengah tercatat sebanyak 26.190.629 orang (menurut data KPU), dan dengan menggunakan taraf kepercayaan 95%, atau tingkat kesalahan 5% (0,05), maka rumus tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikut: $n = \frac{26.190.629}{(26.190.629 \times 0,0025 + 1)} = 399,99$ (dibulatkan = 400)

Pengambilan sampel dari populasi dilakukan berdasarkan karakteristik kewilayahan, yaitu terdiri dari wilayah pantura, tengah (pedalaman), dan pantai selatan. Masing-masing wilayah juga terbagi menjadi letaknya, yaitu mewakili timur, tengah dan barat. Sampel Wilayah pantura adalah Kabupaten Jepara (Dapil II), Kabupaten Kendal (Dapil I), Kota Pekalongan (Dapil X), dan Kabupaten Brebes (Dapil IX). Wilayah tengah atau pedalaman diwakili oleh Kabupaten Blora (Dapil III), Kota Surakarta (Dapil V), dan Kabupaten Banjarnegara (Dapil VII). Wilayah selatan diwakili oleh Kabupaten Wonogiri (Dapil IV), Kabupaten Purworejo (Dapil VI), dan Kabupaten Cilacap (Dapil VIII). Di setiap kabupaten/kota dipilih beberapa kecamatan/ dapil sebagai area yang ditentukan berdasarkan karakteristik khas setiap wilayah yang juga menunjukkan pusat pertarungan politik di wilayah tersebut. Di setiap kecamatan/dapil, responden diambil dari masing-masing desa/kelurahan atau TPS sesuai data yang tersedia.

Penelitian ini melibatkan 400 responden di 10 Dapil Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 95,2% adalah beragama Islam dan sisanya Katolik 3% dan Protestan 1,8%. Jumlah tersebut menyesuaikan komposisi pemeluk agama yang dominan di Jawa Tengah serta keterlibatan kelompok pemeluk agama tersebut dalam politik.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah panduan wawancara mendalam untuk

informan serta daftar pertanyaan tertutup atau kuesioner untuk responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang merupakan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan adanya 3 kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008: 88). Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan frekuensi, rerata, tabulasi silang dan persentase. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan teknik deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Berdasarkan tipologi perwilayahan, Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi wilayah pantura, wilayah tengah dan selatan. Wilayah pantura secara historis identik dengan wilayah santri, yang pada masa Orde Baru identik dengan pemilih hijau. Partai-partai berbasis agama (Islam) mendapatkan suara yang cukup besar di daerah Pantura. Seiring perkembangan politik, dominasi tersebut mulai berkurang dan partai-partai berhaluan nasionalis mulai mendapatkan tempat di wilayah Pantura. Wilayah tengah dan selatan memiliki tipologi yang hampir sama, yakni suara didominasi oleh partai-partai nasionalis. Pemilih lebih loyal kepada partai politik berhaluan nasionalis, terutama partai yang sudah cukup lama berdiri. Secara umum, partai-partai berhaluan nasional mendominasi perolehan suara, 3 besar pertama adalah PDIP, Demorot dan Golkar, seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Pada Pemilu 2009 di Jawa Tengah (10 besar)

No	Partai	DPR RI	DPRD
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21.93	22.98
2	Partai Demokrat (PD)	15.95	15.74
3	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	12.76	11.54
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.87	7.85
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7.14	7.19
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.95	6.71
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.15	6.21
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4.96	5.35
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.4	3.09
10	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	1.82	1.83

Sumber: KPUD Jateng

Partai Islam relatif mendapat dukungan di Pantura, sedangkan di wilayah tengah dan selatan lebih dominan partai berbasis nasionalis. Akan tetapi saat ini telah terjadi beberapa pergeseran dimana partai berbasis agama (Islam) di daerah Pantura sudah semakin menurun dan menguatnya partai nasionalis. Di sisi lain wilayah yang dianggap nasionalis justru kekuatan antara PDI Perjuangan dan PAN hampir seimbang, misalnya di Kabupaten Banjarnegara. Di Kabupaten Jepara, kekuatan PDI Perjuangan lebih unggul dibanding PPP yang sebelumnya dominan. Meskipun demikian, di beberapa wilayah secara garis besar peta belum berubah, misalnya di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Demak, suara PKB relatif masih dominan, tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya. Begitu juga di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kota Surakarta, perolehan suara PDI Perjuangan tetap tinggi. Di Kabupaten Purworejo kekuatan Golkar juga masih unggul.

Di sebagian wilayah mulai terjadi pergeseran di mana pemilih tidak lagi setia terhadap partai, namun lebih condong untuk memperhatikan figur calon anggota legislatif. Berdasarkan keterangan para informan di 10 Dapil, politik uang pada pemilu 2009 semakin menguat, di sisi lain loyalitas terhadap partai menurun dan figur caleg menjadi lebih penting. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengarahkan pilihan sudah sangat berkurang dan pengaruh media massa semakin kuat dalam mempengaruhi orientasi pemilih. Masyarakat kini semakin kritis menyikapi situasi politik yang akan mempengaruhi orientasi memilihnya. Di sisi lain, pada beberapa kasus di beberapa daerah, masih terlihat adanya loyalitas terhadap partai, terutama yang berhaluan nasionalis. Peta perolehan suara di setiap daerah pada pemilu 2009 menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran tersebut, di sisi lain juga menunjukkan adanya loyalitas pemilih terhadap partai politik tertentu.

Berdasarkan studi sebelumnya terjadi kecenderungan pergeseran secara umum di Jawa Tengah dimana orientasi pemilih dari pemilih yang loyal terhadap partai yang berbasis

agama di Pantura dan nasionalis di tengah dan selatan menjadi pemilih yang rasional pragmatis dan kedudukan figur menjadi penting. Fenomena ini juga terjadi pada partai-partai berbasis agama (Islam), dimana loyalitas pemilih terhadap partai politik dan aliran tertentu menurun, justru kecenderungan menguatnya tokoh individu atau figur. Menurut penuturan para informan, peran pemuka agama dalam mempengaruhi umat semakin melemah karena adanya pergeseran pemilih yang semakin rasional dan pragmatis, serta cenderung individualis dalam menentukan pilihan. Akibatnya terjadi pergeseran perolehan suara dan kursi di DPRD. Kebanyakan partai Islam mengalami penurunan, kecuali PKS, sebagaimana tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perolehan Kursi Anggota DPRD Jateng dalam pemilu 2004 dan 2009 di Jawa Tengah

No	Partai	2004	2009	+/-
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	31	23	- 8
2	Partai Demokrat (PD)	10	16	6
3	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	17	11	- 4
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	10	3
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	10	10	0
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15	9	- 4
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		9	9
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10	7	-3
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		4	4
10	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)		1	1
Jumlah		100	100	

Sumber: KPUD Jateng

Fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan sistem pemilihan umum dari daftar tertutup menjadi daftar terbuka. Sistem pemilihan dengan daftar terbuka, dimana pemilih bisa menentukan langsung calon yang dipilih membuka persaingan yang ketat antar caleg. Setiap caleg meskipun dari partai yang sama saling bersaing memperoleh suara. Akibatnya kekuatan partai politik dalam menggalang pemilih yang ideologis berkurang, digantikan oleh kekuatan pribadi para caleg.

Untuk menarik suara dari pemilih, masing-masing caleg menggunakan kekuatan sumberdayanya sendiri, terutama uang, sementara partai politik tidak menggunakan kekuatan ideologinya. Pendidikan politik yang

dilakukan oleh partai politik lemah, penegasan ideologi menjadi kabur dan membuat partai-partai kehilangan identitasnya. Di sisi lain para caleg yang kebanyakan bukan kader partai menggunakan berbagai macam cara yang tidak sesuai dengan ideologi partai. Para caleg menggunakan kekuatan uang untuk menarik dukungan dari pemilih. Oleh sebab itu politik uang sudah dianggap sebagai kewajaran bagi pemilih.

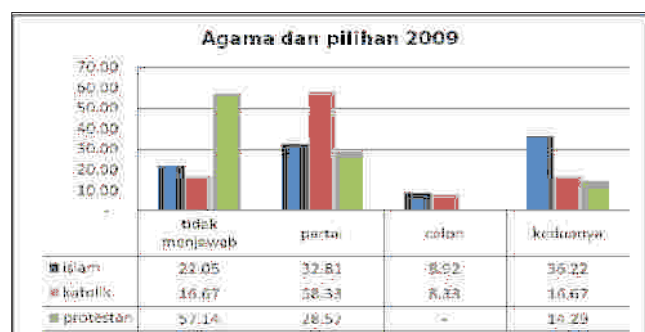
Fenomena inilah yang memunculkan karakteristik pemilih yang rasional, lebih melihat pada figur, mengabaikan ideologi partai serta sangat pragmatis. Di satu sisi pemilih dihadapkan pada kesempatan memilih figur yang menurut mereka kompeten, di sisi lain dihadapkan pada kesempatan mendapatkan uang dari para caleg.

Karakteristik Pemilih Berdasarkan Agama

Perilaku politik para pemilih dari agama yang berbeda-beda tidak terlalu menunjukkan perbedaan mendasar. Keselarasan antara agama dan aliran partai tidak begitu kentara, dimana pemilih Islam juga tidak selalu memilih partai berbasis agama (Islam), karena sekarang kecenderungan nasionalisme menguat.

Pada pemilu tahun 2009 banyak pemilih yang bimbang menentukan pilihan caleg, sehingga sebagian besar mereka menentukan pilihannya pada partai politik. Sebagian besar umat Islam menentukan pilihannya baik untuk partai politik maupun calegnya. Sebagian besar umat Katolik, lebih menyerahkan pilihan mereka pada partai politik, sebagaimana gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Agama dan pilihan dalam pemilu 2009

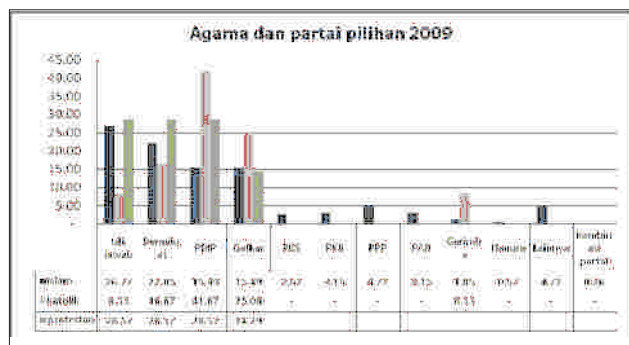


Di banyak tempat, peran tokoh agama cenderung menurun di hadapan umatnya, sehingga

orientasi pilihan pemilih pun tidak selalu berbasis agama. Hanya partai berbasis agama yang terbilang modern saja yang mampu mempertahankan suaranya, dengan mengedepankan rasionalitas seperti PKS. Hal ini seiring dengan kecenderungan pemilih yang semakin rasional.

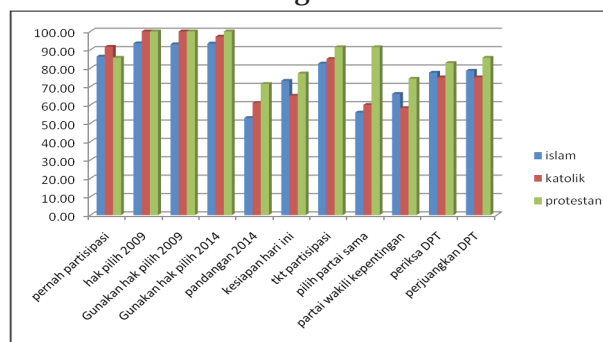
Pemilih Islam cenderung tersebar dalam memilih partainya. Partai besar berhaluan nasionalis seperti PDI Perjuangan, Demokrat dan Golkar dipilih oleh semua kelompok agama, sedangkan Gerindra menjadi partai baru yang juga diterima semua kalangan, sebagaimana gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Agama dan partai pilihan dalam pemilu 2009



Terhadap pemilu 2014, mayoritas orang beragama Islam relatif rendah loyalitasnya terhadap partai berbasis Islam dan cenderung masih bimbang menentukan pilihan. Kesetiaan terhadap partai politik di kalangan Islam relatif rendah kesetiannya dibanding mereka yang beragama Kristen Protestan, sebagaimana gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Perilaku memilih berdasarkan agama

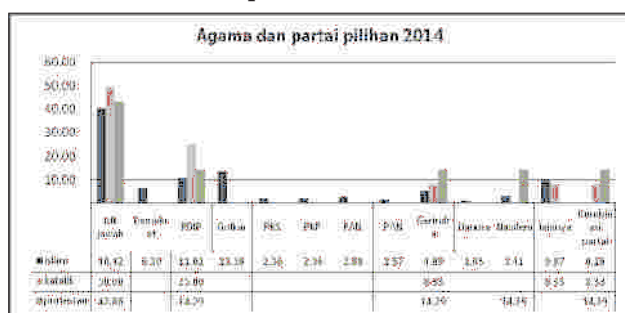


Tingkat kepercayaan umat Katolik terhadap partai politik sebagai perwakilan kepentingan

rakyat paling rendah, begitu juga dengan tingkat kesiapan mereka menghadapi pemilu. Umat Islam tergolong masih bimbang dalam menentukan pilihan baik caleg maupun partai politik.

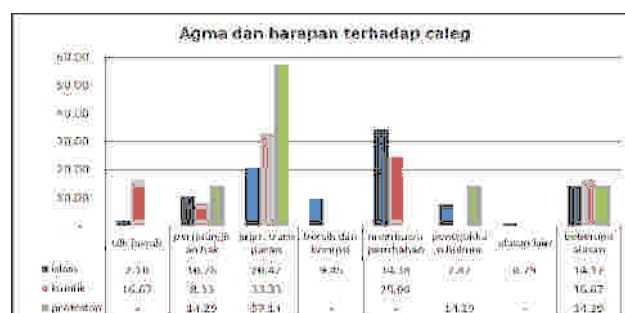
Para pemilih dari berbagai kalangan agama di tahun 2014 cenderung memilih Gerindra dan Nasdem, setelah itu PDIP. Pemilih Katolik cenderung mendukung PDIP sebagai partai pilihan mereka. Pemilih yang beragama Protestan lebih condong memilih Gerindra. Pemilih Islam tersebar di banyak partai nasionalis maupun berbasis Islam, seperti gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4. Agama dan partai pilihan dalam pemilu 2014



Untuk harapan terhadap caleg dan juga partainya yang terpilih, semua kalangan setuju untuk memilih mereka yang memperjuangkan hak. Mereka yang beragama Kristen Protestan lebih memilih wakil yang jujur dan transparan, sedangkan mereka yang beragama Islam dan Katolik banyak yang memilih caleg yang diharapkan membawa perubahan sebagaimana gambar 5 di bawah ini.

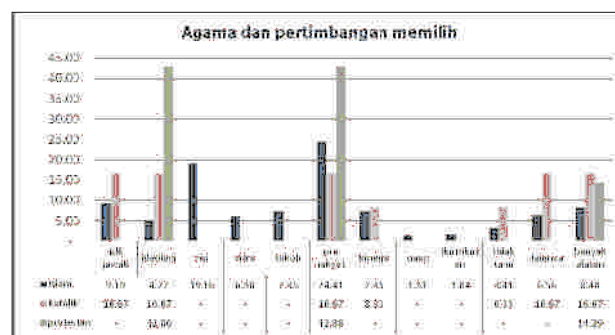
Gambar 5. Agama dan harapan terhadap caleg yang terpilih dalam pemilu



Mereka yang beragama Kristen Protestan lebih banyak memilih karena pertimbangan ideologis dan pro rakyat. Mereka yang beragama Islam dan

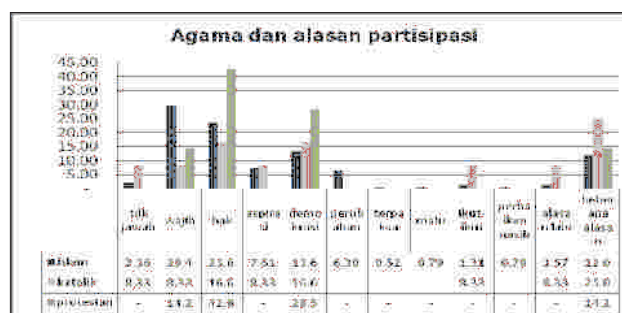
Katolik lebih memilih dengan pertimbangan pro rakyat dan kinerja. Mereka yang beragama Islam juga lebih memilih dengan pertimbangan visi sejalan, citra dan ketokohan seperti terlihat pada gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6. Agama dan pertimbangan memilih dalam pemilu



Untuk alasan berpartisipasi dalam pemilu, lebih banyak responden memandang sebagai hak dan keinginan mewujudkan demokrasi, sedangkan alasan sebagai kewajiban lebih banyak diyakini oleh mereka yang beragama Islam. Sebagian besar umat Protestan memandang pemilu sebagai hak, sedangkan sebagian umat Katolik memandang memilih merupakan hak dan sarana mewujudkan demokrasi. Sebagian kecil dari umat Kristen Protestan dan Islam memandang pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi dan menyalurkan aspirasi sebagaimana gambar 7 berikut.

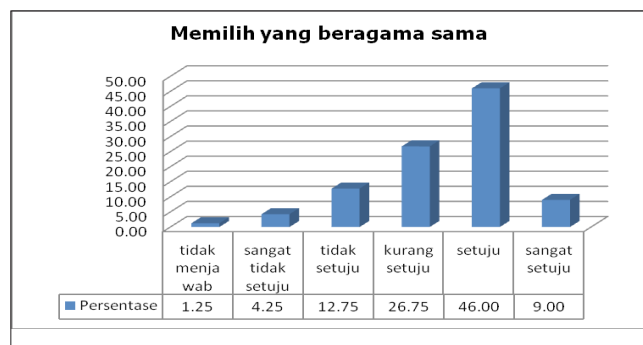
Gambar 7. Agama dan alasan berpartisipasi dalam pemilu



Terkait dengan orientasi pilihan terhadap caleg didapatkan hasil masih adanya pengaruh agama. Sebagian besar responden secara umum setuju (46%) untuk memilih calon atau kandidat yang agamanya sama. Meskipun pilihan partainya berhaluan nasionalis, sebagian pemilih akan

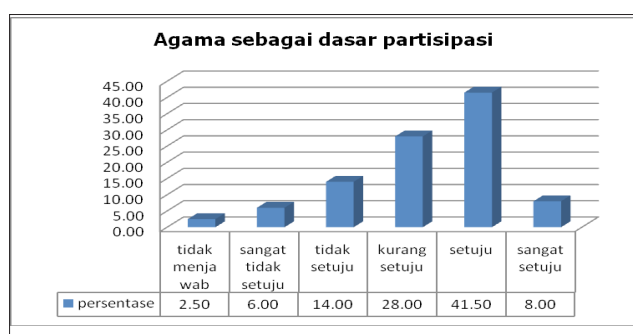
tetap mempertimbangkan latar belakang figur atau calon yang akan dipilih dari sisi agamanya sebagaimana gambar 8 di bawah ini.

Gambar 8. Memilih calon yang sama agamanya



Begitu juga dengan nilai-nilai yang melandasi seseorang berpartisipasi. Meskipun ada studi yang menyebutkan menurunnya peran agama, namun penelitian ini menemukan bahwa 41,5% responden setuju dan 8% sangat setuju mereka menggunakan agama sebagai landasan tata nilai dalam berpartisipasi, menentukan mana yang baik dan tidak. Agama membimbing seseorang untuk memilih, menentukan mana yang baik dan tidak baik dalam memilih calon legislatif.

Gambar 9. Nilai agama sebagai landasan berpartisipasi



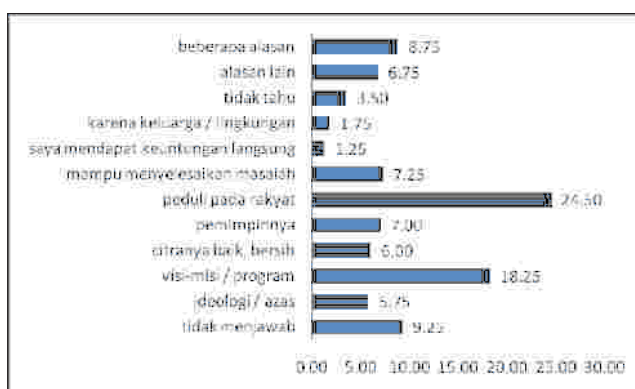
Responden yang mengatakan tidak setuju atau kurang setuju ada beberapa alasan. Pertama, adalah masalah substansial pemilu, agama bukanlah alat yang bisa dilibatkan dalam proses demokrasi maupun pemilu. Agama tidak ada kaitannya dengan demokrasi, agama adalah sebuah keyakinan religius sedang pemilu kebutuhan dunia. Kedua, karena dapat memecah belah persatuan, karena Indonesia adalah negara beragam. Ketiga, adalah pihak yang menempatkan agama tidak ada hubungannya dengan pemilu

namun merupakan persoalan sensitif yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Bagi mereka yang setuju, agama merupakan landasan mental spiritual yang sangat kuat, bagi umatnya berguna untuk menilai mana yang baik dan tidak, mana pemimpin yang baik dan tidak. Pemimpin merupakan panutan mereka, maka mereka akan memilih orang yang beragama sama.

Sebagian besar pemilih (46%) lebih mengutamakan memilih dari orang yang beragama sama, alasannya adalah karena orang yang seagama mempunyai ukuran kebenaran yang sama, hukum yang sama, jika berbeda agama maka akan berbeda pola pikirnya. Sementara mereka yang kurang dan tidak setuju harus selalu memilih dari agama sama memiliki pendapat bahwa agama bukan menjadi jaminan kinerja seseorang bagus, yang mereka pilih adalah orang yang kapabel tidak bermasalah jika agamanya berbeda. Karakter pribadi seorang figur lebih menonjol ketimbang latar belakang agamanya. Peduli pada rakyat, visi-misi atau program dan kemampuan menghadapi masalah menjadi pertimbangan utama pemilih, sebagaimana gambar 10 di bawah ini.

Gambar 10. Alasan memilih partai atau calon tertentu pada tahun 2014



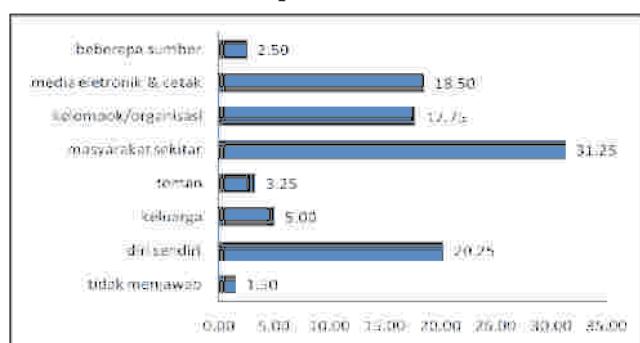
Media Politik

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa media massa khususnya televisi merupakan sarana ampuh dalam sosialisasi dan pendidikan politik. Televisi merupakan media utama bagi pemilih untuk mengetahui informasi atau perkembangan politik. Media-media yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu di pusat dan daerah adalah televisi (TV) sebagai media yang

paling utama sebagai sumber informasi (37%), keluarga/teman (26%), poster/billboard/pamflet (18%), dan Kepala RT (12%). Di tingkat lokal, spanduk atau papan reklame dan sejenisnya menjadi media utama pengenalan caleg dan visi misi mereka. Poster yang dipasang di pinggir jalan, ditempelkan di pohon, tembok dan tempat umum lainnya merupakan media kampanye utama para kandidat.

Ketika ditanyakan kepada responden, sumber pengetahuan/ pendidikan politik masyarakat saat ini ternyata sebagian besar berasal dari perbincangan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Sumber kedua adalah pengetahuan yang diperoleh secara mandiri, baik melalui bahan bacaan maupun pengetahuan lainnya. Kemudian sumber dominan lainnya adalah media elektronik (televise) dan surat kabar.

Gambar 11. Sumber pengetahuan politik pemilih



Dari berbagai media dan sumber yang ada, berdasarkan tanggapan responden media-media tersebut telah mempengaruhi mereka untuk menentukan pilihannya. Sebanyak 34% orang Indonesia mengatakan iklan kampanye di TV adalah cara yang paling efektif mendorong mereka untuk memilih, kemudian acara dialog di televisi atau radio (12%), informasi dari mulut ke mulut (12%), pertemuan agama (12%), pertemuan informal (12%), debat antara kandidat (7%), atau poster/spanduk (5%).

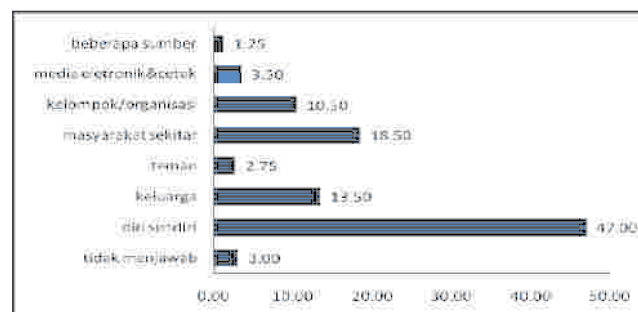
Dari jawaban responden di atas, bahwasanya pertemuan atau lembaga-lembaga agama ternyata masih menjadi salah satu event penting dalam menggali dukungan. Baik dalam acara peribadatan, pengajian atau acara sejenisnya menjadi salah satu media yang digunakan untuk

menggali dukungan. Dengan demikian, meskipun latar belakang agama cenderung rendah, namun masih membuka peluang untuk dijadikan pintu masuk bagi caleg untuk meraih dukungan.

Demikian juga peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengarahkan pilihan terhadap masyarakat sudah sangat berkurang perannya. Di sisi lain, pengaruh media massa semakin kuat dalam mempengaruhi orientasi pemilih. Masyarakat kini semakin kritis menyikapi situasi politik yang akan mempengaruhi orientasi memilihnya.

Melemahnya peran tokoh agama dan menguatnya peran media dapat dilihat dari sumber-sumber penentu keputusan politik. Ketika responden diminta menjawab pertanyaan siapa pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan keputusan, jawaban terbesar adalah diri sendiri, kemudian masyarakat sekitar dan keluarga, sebagaimana gambar 12 di bawah ini.

Gambar 12. pihak yang berpengaruh dalam keputusan memilih



Dari data di atas, terlihat bahwasannya keputusan seseorang memilih adalah keputusan diri sendiri. Hal tersebut menandakan pemilih sudah semakin rasional dan pengaruh berbagai lingkungan semakin menurun, termasuk lembaga dan tokoh agama.

Temuan Penting

Ada beberapa fenomena unik yang umum terjadi dan sebagian mungkin hanya terdapat di daerah tertentu saja. Fenomena unik secara umum terjadi di hampir seluruh wilayah adalah bahwa *money politics* sebagai suatu pelanggaran sulit diungkap. Menurut penuturan informan, hal tersebut terjadi karena pelakunya dikenal,

orang sungkan mau melaporkan karena kenal dengan pelakunya, tidak enak, dan sebagainya. Fenomena lainnya adalah perjudian atau *botoh*, dimana seseorang berjudi mendukung atau tidak mendukung seorang caleg. Hal tersebut merupakan dampak dari pilkades yang memang terdapat fenomena tersebut.

Fenomena unik lainnya yang muncul adalah pergeseran pola politik uang. Perubahan pola pemilihan yang menggunakan sistem daftar terbuka memungkinkan persaingan antara caleg semakin tinggi. Persaingan terjadi tidak hanya dari caleg antar partai yang berbeda, tetapi dari caleg dalam satu partai. Akibat persaingan yang tinggi maka politik uang juga berkembang semakin massif. Metode yang digunakan para caleg dapat dikelompokkan menjadi 2 aras, yaitu aras komunal dan aras personal. Aras komunal dilakukan antara lain melalui sumbangan infrastruktur atau sarana fisik berupa jalan, jembatan, tempat ibadah, atau fasilitas umum lainnya. Ada juga caleg yang memberikan bantuan peralatan seperti kendaraan, tenda dan sebagainya untuk kepentingan warga. Antara caleg dan masyarakat terdapat kesepakatan perolehan suara caleg dengan minimal jumlah tertentu (mayoritas). Ada kalanya ketika warga gagal memenuhi target, misalnya suara kurang dari yang diharapkan, maka caleg membatalkan kesepakatan atau menarik kembali sumbangannya.

Pada aras individu, *money politics* berupa pemberian uang langsung dengan jumlah tertentu. Pemberian uang di perkotaan jumlahnya lebih besar daripada di desa. Setiap wilayah juga berbeda besaran jumlahnya, tergantung dari situasi persaingan dan tingkat perekonomian di suatu daerah.

Money politics pada aras individu ini cukup beragam kasusnya di beberapa daerah. Di banyak daerah, seorang warga seringkali mendapatkan pemberian uang dari beberapa caleg secara bersamaan. Dalam menyikapi pemberian ini, ada beberapa fenomena unik. Hampir semua pemilih yang mendapatkan uang dari beberapa caleg akan mereka terima semua.

Kecenderungan pertama, ialah seorang pemilih yang menerima uang dari beberapa caleg akan menentukan pilihannya berdasarkan jumlah uang yang diberikan, siapa yang paling banyak itulah yang dipilih. Kecenderungan kedua adalah pemilih akan menentukan berdasarkan pilihan hati nurani, tidak terkait dengan jumlah uang. Siapa yang paling mereka sukai, paling dekat, kerabat atau sepaham yang akan mereka pilih meskipun mereka menerima uang dari beberapa caleg. Kecenderungan ketiga adalah bahwa seseorang akan memilih siapapun yang memberikan uang terakhir kalinya, siapapun yang memberikan uang terakhir itulah yang berpeluang dipilih.

Dari kecenderungan terakhir itulah muncul istilah “serangan fajar” untuk menunjukkan adanya politik uang dibagikan hari terakhir menjelang pemilihan. Tim sukses akan membagikan uang pada dini hari atau setelah subuh. Semakin ketatnya persaingan antar caleg, kini memunculkan istilah baru, yaitu “serangan dhuha”. Istilah tersebut untuk menunjukkan bahwasannya pemberian uang dilakukan pada menit-menit terakhir pemungutan suara atau waktu dhuha. Serangan dhuha ini terkait dengan taktik untuk menjaring pemilih yang mendasarkan pada pertimbangan siapa yang membrikan uang terakhir kalinya. Bahkan di beberapa kawasan pantura ditemukan bahwa pemberian uang dilakukan tidak jauh dari TPS.

Terkait dengan beberapa nilai agama, di sebagian wilayah pantura muncul fenomena unik, yaitu seorang pemilih akan memilih beberapa caleg di dalam satu surat suara. Ketika seseorang menerima uang dari beberapa caleg, mereka terikat dengan kesepakatan menerima uang untuk memilih. Berdasarkan hukum agama, sebuah akad harus dipenuhi, oleh sebab itu sebagai wujud memenuhi akad menerima uang untuk memilih, maka pada hari pemilihan, setiap caleg yang memberikan uang harus dipilih. Oleh karena seseorang menerima uang lebih dari 1 caleg, mereka juga akan memilih semua yang memberikan uang.

Berdasarkan tanggapan responden serta beberapa fenomena tersebut, ada beberapa fenomena menarik lainnya terkait dengan kecenderungan umum partai politik dan pemilih, antara lain:

Berdasarkan perolehan suara dan kursi legislatif dalam pemilu, terdapat kecenderungan masih kuatnya partai-partai nasionalis dan partai-partai berbasis agama (Islam) masih belum mampu meraih suara optimal dari pemeluk Islam;

Agama masih menjadi landasan untuk menilai mana yang baik dan tidak, mana pemimpin yang baik dan tidak, namun masyarakat cenderung memisahkan kehidupan agama dari politik, partai politik Islam belum dipandang sebagai media menyalurkan aspirasi politik.

Berdasarkan pertimbangan memilih para responden, mereka lebih mempercayai rasionalitas diri sendiri, dimana sebagian besar responden menyatakan bahwa penentu memilih adalah diri sendiri.

Faktor figur politik lebih menonjol dibanding partai politik atau ideologi/aliran, masyarakat lebih memandang kiprah individu caleg dibanding ideolog partai.

Media massa (televisi) merupakan sarana paling efektif untuk melakukan kampanye, selain itu media tradisional di masyarakat seperti pertemuan, omong-omong masih cukup berpengaruh;

Politik uang sudah menjadi hal umum dalam pemilu baik bagi masyarakat maupun caleg, sehingga sangat sulit dicegah jika penegakan hukum tidak diupayakan secara serius. Kekuatan uang sangat berpengaruh dalam politik di semua level, dengan istilah "keuangan yang maha kuasa";

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam menentukan pilihannya masyarakat lebih dipengaruhi dari pertimbangan rasionalitas diri sendiri yang lebih bersifat pragmatis. Peran agama pada perilaku politik seorang ialah memberikan batasan mana yang baik dan tidak baik, menilai seorang figur dalam koridor nilai-nilai atau norma

agama. Agama menjadi landasan dan rujukan nilai dalam memilih caleg yang baik dan tidak. Sebagian besar pemilih tidak melihat latar belakang aliran dan ideologinya, tidak harus beraliran agama, yang penting dalam penilaian pemilih seorang figur memenuhi kriteria yang mereka anggap baik berdasarkan pertimbangan diri sendiri untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

Sebagian pemilih memandang agama terpisah dari kenegaraan, tidak mencampurkan agama dalam kehidupan politik, sehingga partai berbasis agama kurang mendapatkan dukungan. Meskipun partai nasionalis lebih dominan, namun pada saat menentukan caleg yang dipilihnya, kesamaan agama masih menjadi pertimbangan. Media-media pertemuan keagamaan masih digunakan untuk menjaring pemilih baik oleh partai berhaluan agama maupun nasionalis.

Menguatnya rasionalitas individu berdasarkan sumber informasi media massa di satu sisi menurunkan peran tokoh agama dalam menentukan pilihan. Akan tetapi, rasionalitas individu yang terbangun lebih kearah rasionalitas ekonomis, memilih berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi karena diperkuat dengan maraknya money politics.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Basyar, M. Hamdan. 2004. "Pemilih "Hijau" di Kota Santri: Kasus Pemilu 2004 di Pekalongan", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 1 No. 1, 2004, Hal. 49-60, Pusat Penelitian Politik- LIPI
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote, Ronald H. 2007. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*,

- diterjemahkan dari judul asli "Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom" oleh Haris Munandar dan Dudi Priatna. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gatara, AA, Sahid. 2009. *Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haynes, Jef. 2000. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, diterjemahkan dari judul asli "Democracy and Civil Society in the Third World Politics and New Political Movement" oleh P, Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lembaga Survey Indonesia. 2011. *Pemilih Mengambang Dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik*, Rilis tahun 2011
- Mas'ood, Mohtar dan Colin, Mac Andrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mietzner, Marcus, 2009. *Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia Catalyst or obstacle to democratic consolidation?*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 165, no. 1 (2009), pp. 95–126, <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv>
- Mujani, Saiful and R. William Liddle. 2010. Indonesia; personalities parties, and voters, *Journal of Democracy Volume 21*, Number 2 April 2010.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu, Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Jogjakarta: UGM.
- Romli, Lili, 2004. "Partai Islam dan Pemilihan Islam di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 1 No. 1, 2004, Hal. 29-48.
- Sharma, Rakesh Lauren Serpe, and Astri Suryandari. 2010. *Indonesia Electoral Survey 2010* November 2010, IFES (International Foundation for Electoral Systems) for the Australian Agency for International Development
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini Prof. Dr. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Zuhro, R, Siti, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya politik di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.

Basis Data Tanpa Penulis

- KPU, Pemilu Tahun 2009 Dalam Angka, www.kpu.go.id
- KPUD Jawa Tengah, 2005, Pemilu Dalam Angka 2004 - 2005
- _____, 2009, Buku Kilasan Pemilu 2009